RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2020

No	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN											
		Jan	Pebr	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
I.	MANAJEMEN PERUBAHAN												
1	Membentuk Tim Asesor Reformasi Birokrasi di lingkungan Bapenda Tahun 2020												
2	Menyusun Renja Reformasi Birokrasi Bapenda 2020												
3	Melaksanakan sosialisasi Renja Reformasi Birokrasi Bapenda Tahun 2020												
4	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renja Reformasi Birokrasi Bapenda Tahun 2020												
5	Membentuk Agen Perubahan Tahun 2020												
II.	PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN												
1	Melakukan identifikasi terhadap peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan dilakukan analisis dan revisi atas peraturan perundang-undangan tersebut dalam rangka mewujudkan birokrasi yang efisien dan efektif												
III.	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI												
1	Melakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang dihasilkan												
IV.	PENATAAN TATALAKSANA												
1	Melakukan evaluasi peta proses bisnis dan prosedur operasional standar (SOP) yang telah disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi dan hasilnya ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan peta proses bisnis dan SOP;												
2	Memanfaatkan e-goverment secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Website, Sosial Media, Lapor SP4N dan Surat warga)												
3	Menerapkan keterbukaan informasi publik												

No	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN											
		Jan	Pebr	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
V	PENATAAN SISTEM SDM APARATUR												
1	Menyusun perencanaan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.												
2	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi												
3	Penerapan Indikator Kinerja Individu												
VI	PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA												
1	Melaksanakan Perjanjian Kinerja sampai level staf sebagai bukti keterlibatan pimpinan dalam penerapan AKIP												
2	Pengukuran kinerja dengan berbasis elektronik dengan menggunakan aplikasi e-Monev												
3	Melaksanakan pemutakhiran data kinerja (update realisasi PAD) sebagai dasar pengukuran kinerja Bapenda												
VII	PENGUATAN PENGAWASAN												
1	Pencegahan gratifikasi melalui pelaporan LHKPN dan LHKSN												
2	Penerapan SPIP, melalui identifikasi dan penilaian resiko (Dokumen Penilaian Resiko)												
3	Penanganan Pengaduan Masyarakat												
4	Sosialisasi tentang Pengendalian Gratifikasi, Penanganan Pengaduan dan Penanganan Benturan Kepentingan dalam setiap jabatan, pekerjaan, dan fungsi di antara pegawai												
VIII	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK												
1	Reviu atas penyusunan Standar Pelayanan dan diformalkan												
2	Melakukan sosialiasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima yang meliputi kode etik dan estetika pelayanan prima												

No	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN											
		Jan	Pebr	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
3	Penyebarluasan informasi pelayanan udah diakses masyarakat bisa diakses melalui (website, sosial media, leaflet, dan banner)												
4	Melaksanakan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) melalui kuisioner dan Kotak Kepuasan WP												
5	Penerapan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Public Pajak Daerah												

Kepanjen, Januari 2020

KEPALA BADAN PENDAPATAN DERAH
KABUPATEN MALANG

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dr. PURNADI, SH., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19600508 198603 1 021